



BALAI
KIPM
MEDANI

LK Semester I T.A 2025

BPP
MHKP
Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

2025



BerAKHLAK

ZONA INTEGRITAS Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I (Balai KIPM Medan I) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Medan I mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai KIPM Medan I. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Deli Serdang, Juli 2025

Kepala,

Nandang Koswara, S.TP, M.M

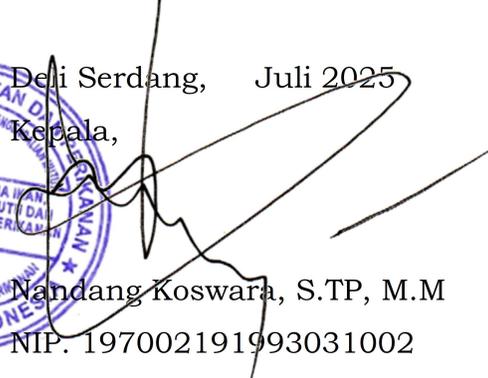
DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Lapaoran Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos LRA	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-pos LO	47
E. Penjelasan atas Pos-pos LPE	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	57
VI. Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai KIPM Medan I yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Deli Serdang, Juli 2025
Kepala,

Nandang Koswara, S.TP, M.M
NIP. 197002191993031002



Laporan Keuangan Balai KIPM Medan I Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama semester I dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada semester I TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 659,481,531 atau mencapai 18,88 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.627,000,000. Realisasi Belanja Negara pada semester I TA 2025 adalah sebesar Rp5,658,420,000 atau mencapai 42.20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp13,407,954,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada semester I Tahun 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp22,083,446,788 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp142,030,975; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp21,941,415,813; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp243,195,756 dan Rp22,083,446,788.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan semester I 2025 adalah

sebesar Rp 654,307,000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6,135,929,708 dan terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5,481,622,708. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5,169,500 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5,476,453,208.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada 2025 adalah sebesar Rp19,413,179,157 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5,476,453,208 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp25 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14,536,779,925 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal Semester I Tahun 2025 adalah senilai Rp28,473,505,899.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester I tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk semester I Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KIPM MEDAN I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)						
Uraian	Cat.	Th.2025				Th.2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah						
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	3.627.000.000	659.481.531	- 2.967.518.469	18,18	327.039.203
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		3.627.000.000	659.481.531	- 2.967.518.469	18,18	327.039.203
Belanja						
Belanja Pegawai	B.2	7.876.238.000	4.105.873.123	-3.770.364.877	52,13	1.737.804.749
Belanja Barang	B.3	5.531.716.000	1.552.547.522	-3.979.168.478	28,07	843.876.723
Belanja Modal	B.4	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		13.407.954.000	5.658.420.645	-7.749.533.355	99,50	2.581.681.472

II. NERACA

BALAI KIPM MEDAN I				
NERACA				
PER 30 Juni 2025 dan 2024				
				(dalam Rupiah)
Uraian	Catatan	2025	2024	
ASET				
ASET LANCAR				
	C.1			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	90.000.000		-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-		-
Kas Lainnya dan Setara kas	C.1.3	-		-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-		5.031
Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugia	C.1.5	-		-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.6	-		-
Penyisihan piutang tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.7	-		25
Belanja dibayar di muka	C.1.8	-		3.750.000
Pendapatan yang masih harus diterima	C.1.9			
Persediaan	C.1.10	418.217.373		34.972.745
JUMLAH ASET LANCAR		508.217.373		38.727.751
ASET TETAP				
	C.2			
Tanah	C.2.1	11.490.774.000		10.843.761.000
Peralatan dan mesin	C.2.2	21.055.756.086		10.528.388.102
Gedung dan Bangunan	C.2.3	15.967.499.002		8.271.206.188
Jalan, irigasi dan jaringan	C.2.4	1.053.028.550		840.538.550
Aset tetap lainnya	C.2.5	65.068.200		11.320.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.2.6	-		-
Akumulasi penyusutan aset tetap	C.2.7	- 21.226.673.627		- 11.092.967.487
JUMLAH ASET TETAP		28.405.452.211		19.402.246.353
JUMLAH ASET		28.913.669.584		19.440.974.104
PIUTANG JANGKA PANJANG				
	C.3			
Piutang tagihan tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.3.1	-		-
Piutang tagihan penjualan angsuran	C.3.2	-		-
Penyisihan piutang tidak tertagih - piutang jangka panjang	C.3.3	-		-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG				
ASET LAINNYA				
	C.4			
Aset tak berwujud	C.4.1	-		-
Aset lainnya	C.4.2	-		-
Akumulasi penyusutan/Amostisasi aset lainnya	C.4.3	-		-
JUMLAH ASET LAINNYA				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	C.5			
Uang muka dari KPPN	C.5.1	90.000.000		-
Utang kepada pihak ketiga	C.5.2	310.788.535		27.794.947
Utang yang belum ditagihkan	C.5.3	39.375.150		-
Beban yang masih harus dibayar	C.5.4	-		-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		440.163.685		27.794.947
JUMLAH KEWAJIBAN		440.163.685		27.794.947
EKUITAS				
	C.5.6			
Ekuitas	C.5.6	28.473.505.899		19.413.179.157
JUMLAH EKUITAS		28.473.505.899		19.413.179.157
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		28.913.669.584		19.440.974.104

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KIPM MEDAN I			
Laporan Operasional			
Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.1	654.307.000	321.620.000
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN			
Beban pegawai	D.2	4.351.058.458	1.829.288.570
Beban persediaan	D.3	188.397.299	276.080.315
Beban barang dan jasa	D.4	1.186.514.630	590.161.255
Beban pemeliharaan	D.5	318.509.737	63.283.530
Beban perjalanan dinas	D.6	91.449.584	204.035.973
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat	D.7	-	-
Beban bantuan sosialisasi	D.8	-	-
Beban penyusutan dan amortisasi	D.9	-	535.563.060
Beban penyisihan piutang tak tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN			
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus / Defisit pelepasan aset non lancar		-	5.400.000
Pendapatan pelepasan aset non lancar	D.11	-	5.400.000
Beban pelepasan aset non lancar	D.12	-	-
Surplus / Defisit dari kegiatan non operasional lainnya		5.169.500	
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	D.13	5.169.500	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	D.14	-	-
JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		- 5.476.453.208	- 3.171.392.703
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.15	-	-
Beban Luar Biasa	D.16	-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA			
SURPLUS (DEFISIT) LO		- 5.476.453.208	- 3.171.392.703

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KIPM MEDAN I			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024			
(dalam Rupiah)			
Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	19.413.179.157	22.213.124.185
SURPLUS / DEFISIT - LO	E.2	- 5.476.453.208	- 3.171.392.703
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	25	96
Penyesuaian nilai aset	E.3.1	-	-
Koreksi nilai persediaan	E.3.2	-	-
Selisih revaluasi aset	E.3.3	-	-
Koreksi nilai aset non revaluasi	E.3.4	-	28.970.000
Koreksi lain lain	E.3.5	25	96
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14.536.779.925	2.262.956.394
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		- 9.060.326.742	- 908.436.213
EKUITAS AKHIR		28.473.505.899	21.304.687.972

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai KIPM Medan I

Dasar Hukum Entitas Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Karantina Ikan Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Balai KIPM Medan I mempunyai tugas dan fungsi sesuai Permen KP nomor 6/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan Permen KP nomor 54/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai KIPM Medan I. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAIBA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAIBA terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntan **A.3. Basis Akuntansi**

Balai KIPM Medan I menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

si penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai KIPM Medan I dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan KIPM yang merupakan entitas pelaporan dari Balai KIPM Medan I. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Medan I adalah sebagai berikut:

*Pendapa
tan-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapa
tan-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai KIPM Medan I adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sensor / Karantina, Pengawasan / Pemeriksaan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
an Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan

metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajib

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

an

ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Balai KIPM Medan I* sudah melakukan delapan kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran untuk belanja pegawai berupa gaji pokok serta tunjangan 2025.

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	3.627.000.000	3.627.000.000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	3.627.000.000	3.627.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	7.876.238.000	7.876.238.000
Belanja Barang	5.531.716.000	5.531.716.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	13.407.954.000	13.407.954.000

Realisasi
Pendapatan
Rp659,481,5
31

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp659.481.531 atau mencapai 18,18 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3,627,000,000.

Pendapatan Balai KIPM Medan I terdiri dari Pendapatan, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi serta Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	3.627.000.000	659.481.531	18,18
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-
Jumlah	3.627.000.000	659.481.531	18,18

Realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi TA 2025 lebih besar dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

URAIAN	T.A 2025	T.A 2024	NAIK / TURUN %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	659.481.531	327.039.203	101,65

Realisasi
Belanja
Negara
Rp5,658,420,
645

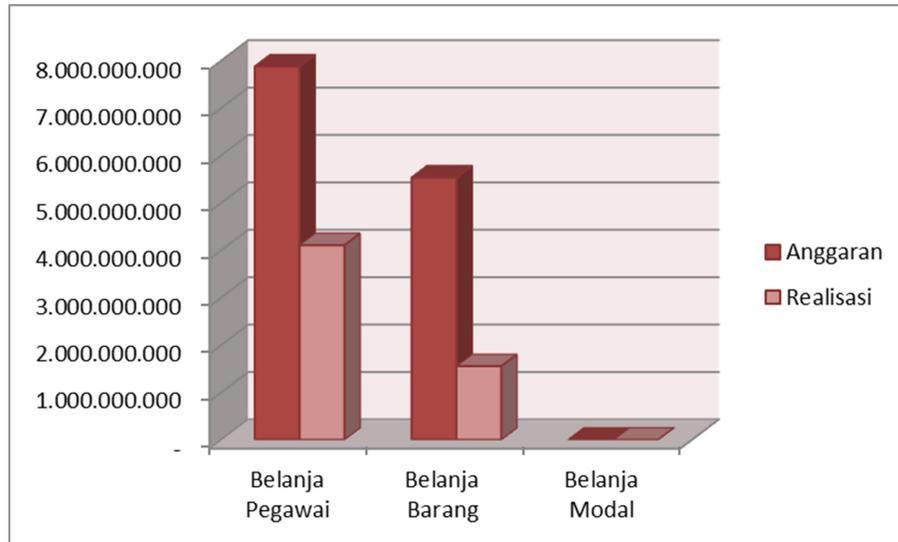
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp5,658,420,645 atau 42,20 persen dari anggaran belanja sebesar Rp13,407,954,000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	7.876.238.000	4.105.873.123	52,13
Belanja Barang	5.531.716.000	1.552.547.522	28,07
Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja	13.407.954.000	5.658.420.645	42,20



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 adalah turun sebesar 10.40 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK /TURUN (%)
Belanja Pegawai	4.105.873.123	1.737.804.749	136,27
Belanja Barang	1.552.547.522	843.876.723	83,98
Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Jumlah	5.658.420.645	2.581.681.472	119,18

Dibandingkan dengan Semester I TA 2025, Realisasi Belanja Semester I TA 2025 adalah naik sebesar 119,18 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, ini terjadi karena adanya penggabungan anggaran stasiun KIPM Medan II dan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan.

Belanja
Pegawai
Rp4,105,873,
123

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,105,873,123 dan Rp1,737,804,749.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 119,18 persen dari TA 2024, yang disebabkan karena adanya penggabungan anggaran stasiun KIPM Medan II dan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan, dan juga kenaikan nilai grade tunjukkan pegawai PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK / TURUN (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.105.873.123	1.737.804.749	136,27
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	4.105.873.123	1.737.804.749	136,27

Belanja
Barang
Rp1,552,547,
522

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,552,547,522 dan Rp843,876,723.

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 54,395 persen dari TA sebelumnya.

Perbandingan Belanja Barang

Akun	URAIAN	TA 2025	TA 2024
5221	Belanja Barang dan Jasa	1.186.514.630	590.161.255
5231	Belanja Pemeliharaan	318.509.737	63.283.530
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	91.449.584	204.035.973
5218	Belanja Barang Persediaan	188.397.299	276.080.315
	Jumlah Belanja Kotor	1.784.871.250	1.133.561.073
	Pengembalian Belanja	-	-

*Belanja
Modal
Rp0*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing - masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester I TA 2025 dan Semester I TA 2024 tidak ada.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Konsultan Perencana Pengurukan	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 dengan realisasi Semester I TA 2024 tidak ada.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin*

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
AC-split	0	0	0,00
UPS	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
PC-Unit	0	0	#DIV/0!
Alat kantor lainnya	-	0	0,00
Peralatan listrik bandara	-	0	0,00
Alat Rumah Tangga	-	0	0,00
Meubelair	-	0	0,00
Microphone wireless	-	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, tidak ada belanja fisik gedung bangunan pada TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Konsultan Persncana Laboratorium	0	0	0,00
Konsultan Pengawas	0	0	0,00
Honor tim teknis	0	0	0,00
Renovasi Ruang Lab	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	Naik / Turun (%)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak ada realisasi Belanja Modal Lainnya pada semester I TA 2025.

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp90,000,000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp90,000,000 dan Rp0 kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai beriku. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	-	-
BPg 123 BKIPM KELAS I MEDAN I	90.000.000	-
Jumlah	90.000.000	-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0, dikarenakan transaksi penyetoran PNPB sudah menggunakan mesin EDC (pembayaran elektronik).

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

dan Setara
Kas Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TH 2025
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-

Piutang PNB
Rp0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp. 5.031.

Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang PNB	-	5.031
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	5.031

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp0,- dan Rp0,-

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar
TPA Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp25.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih -
Piutang Lancar*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sama yaitu sebesar Rp0 dan Rp 3.750.000. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	3.750.000
Jumlah	-	3.750.000

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada

penerima jasa.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Sertifikasi	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp418,217,373*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar dan Rp418,217,373 dan Rp34,972,745.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TH 2025	TH 2024	%
Barang Konsumsi	-	-	#DIV/0!
Barang untuk Pemeliharaan	-	-	#DIV/0!
Suku cadang	-	-	#DIV/0!
Bahan baku	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	2025	2024
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka

Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih –
Piutang Jangka Panjang*

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Panjang	Penyisihan	Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp11.490.774.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai KIPM Medan I per 31 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.490.774.000 dan Rp10.843.761.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	11.490.774.000
<u>Mutasi tambah:</u>	
Revaluasi aset	0
Pengurangan	0
<u>Mutasi kurang:</u>	
Revaluasi aset	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2025	11.490.774.000

Rincian saldo Tanah per 30 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	949 m ²	Jl. Suka Menang, Medan	1.403.097.000
2	4.049 m ²	Jl. Karantina Ikan, Desa Aras Kabu, Deli Serdang	9.440.664.000
3	3.201 m ²		
	9.617 m²	Jumlah	10.843.761.000

*Peralatan dan
Mesin*
Rp21,055,756,086

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp21,055,756,086 dan Rp10,528,388,102.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	21.055.756.086
<u>Mutasi tambah:</u>	
Pembelian	0
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi	0
Pengembangan nilai aset	0
<u>Mutasi kurang:</u>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Koreksi	0
Saldo per 30 Juni 2025	21.055.756.086

Gedung dan
Bangunan
Rp15,967,499,00
2

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sama sebesar Rp15.967.499.002 dan Rp8,271,206,188.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	15.967.499.002
<u>Mutasi tambah:</u>	
Rehabilitasi Gedung	-
Reklasifikasi masuk	
<u>Mutasi kurang:</u>	
Koreksi nilai aset	
Reklasifikasi keluar	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 30 Juni 2025	15.967.499.002
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-

Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp1.053.028.55
0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.053.028.550 dan RP840,538,550. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.053.028.550
<u>Mutasi tambah:</u>	
Revaluasi aset	-
<u>Mutasi kurang:</u>	-
Saldo per 30 Juni 2025	1.053.028.550

Aset Tetap
Lainnya
Rp65,068,200

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp65,068,200 dan Rp11.320.100 ada mutasi tambah atas aset tetap ini untuk Tahun 2025,

sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 202	65.068.200
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2025	65.068.200

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp21,226,673,627*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp21,226,673,627 dan Rp11,092,967,487.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	13,563,877,802	11,682,868,128	1,881,009,674
2	Gedung dan Bangunan	8,076,706,188	841,663,524	7,235,042,664
3	Jalan dan Jembatan	376,106,000	325,958,533	50,147,467
4	Jaringan	464,432,550	97,229,542	367,203,008
Akumulasi Penyusutan		22,481,122,540	12,947,719,727	9,533,402,813

Aset Tak Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2025	-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp90.0000.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp90.000.000,-

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp310,788,535*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp310,788,535 dan Rp27,794,947.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Langganan jasa listrik	-	pembayaran dilakukan pada TA 2025
Langganan jasa telepon	-	pembayaran dilakukan pada TA 2025
Langganan jasa internet	-	pembayaran dilakukan pada TA 2025
Gaji terusan pegawai	-	-
Carry Over Contract	-	-
Jumlah	-	

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada saldo Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 2024. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak ada saldo Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 2024.

*Ekuitas
Rp28,473,505,899*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar dan Rp28,473,505,899 dan Rp19,413,179,157.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp654,307,000*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar dan Rp654.307.000 dan Rp321.620.000. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

No	URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK / TURUN (%)
1	(425289) Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	654.307.000	321.620.000	103,44
Jumlah		654.307.000	321.620.000	103,44

*Beban
Pegawai
Rp4,351,058,458*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,351,058,458 dan Rp1,829,058,458.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Uraian		TH 2025	TH 2024	Naik/Turun (%)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.811.903.180	1.824.140.164	(0,01)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	27.787	27.225	0,02
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	122.324.628	124.692.092	(0,02)
511122	Beban Tunj. Anak PNS	44.950.844	43.468.614	0,03
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	32.760.000	40.320.000	(0,19)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	153.500.000	147.320.000	0,04
511125	Beban Tunj. PPh PNS	3.944.815	4.536.918	(0,13)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	111.888.900	111.961.320	(0,00)
511129	Beban Uang Makan PNS	291.907.000	322.898.000	(0,10)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	20.455.000	22.420.000	(0,09)
512211	Beban Uang Lembur	135.177.000	95.625.000	0,41
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.458.271.517	2.363.318.408	0,04
	Pengembalian Belanja	-3.780.244	0	-
	Kelebihan pembayaran tunjkin bulan Desember 2023	-19.203	0	-
Jumlah		5.183.311.224	5.100.727.741	0,02

*Beban
Persediaan
Rp188,397,299*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp188,397,299 dan Rp276,080,315.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN	2025	2024	NA TURU
Beban persediaan konsumsi	334.232.356	258.585.169	
Beban persediaan bahan baku	128.029.390	244.113.965	
Jumlah	462.261.746	502.699.134	

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1,186,514,630*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan

2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,186,514,630 dan Rp590,161,255.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK / TURUN %
Beban keperluan perkantoran	907.257.273	755.792.310	20,04
Beban penambah daya tahan tubuh	140.448.000	140.448.000	0,00
Beban pengiriman surat dinas/pos surat	7.762.475	7.905.205	-1,81
Beban honor operasional	163.224.000	181.782.000	-10,21
Beban barang operasional lainnya	58.627.025	48.331.525	21,30
Beban bahan	240.212.000	155.908.500	54,07
Beban honor output kegiatan	8.160.000	8.160.000	0,00
Beban barang non operasional	78.098.000	103.546.000	-24,58
Beban langganan listrik	209.366.158	203.638.747	2,81
Beban langganan telepon	3.240.896	3.216.240	0,77
Beban langganan air	3.033.580	1.122.850	170,17
Beban langganan daya dan jasa	0	120.160.471	-100,00
Beban sewa	146.353.000	81.100.002	80,46
Beban jasa profesi	9.250.000	14.600.000	-36,64
Beban jasa lainnya	67.196.500	61.177.511	9,84
Beban barang operasional penanganan COVID-19	0	0	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Jumlah	2.042.228.907	1.886.889.361	8,23

*Beban
Pemeliharaan
Rp318,509,737*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp318,509,737 dan Rp63,283,530.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Penurunan beban pemeliharaan karena adanya

penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK / TURUN %
Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	119.692.040	180.905.000	(33,84)
Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	292.924.760	288.966.360	1,37
Beban persediaan utk pemeliharaan	9.446.179	4.195.952	125,13
Beban persediaan suku cadang	9.131.400	11.326.900	(19,38)
Jumlah	431.194.379	485.394.212	(11,17)

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp91,449,584*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp91,449,584 dan Rp204,035,973.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK / TURUN %
Beban Perjalanan Biasa	396.842.844	175.791.533	125,75
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	179.550.000	93.150.000	92,75
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	330.553.337	209.167.562	58,03
Jumlah	906.946.181	478.109.095	89,69

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 dan 2024. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk

mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat saldo Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2025 dan 2024. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp535,563,060.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024	NAIK / TURUN %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	1.099.868.704	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	168.264.907	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan & Jembatan	-	50.147.467	(100,00)
Beban Penyusutan Jaringan	-	12.362.550	(100,00)
Jumlah Penyusutan	-	1.330.643.628	(100,00)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sama sebesar Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih JK Paniang	0	0	0,00
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non Operasional
Rp(5,481,622.7
08)

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan kembali belanja barang TYL	0	0	0,00
Penerimaan belanja pegawai TYL	0	0	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	#DIV/0!

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat saldo Pos Luar Biasa untuk per 30 Juni 2025. Saldo Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp19,413,179,157

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19,413,179,157 dan Rp22,213,124,185.

Defisit LO
Rp5,476,453,208

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5,476,453,208 dan Rp3,171,392,703.

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sama sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk per 30 Juni 2025 sebesar Rp0. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap pada per 30 Juni 2025 sebesar Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp0

E.3.5 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Tidak terdapat saldo Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 dan 2024. Koreksi ini

merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp14,536,779,92
5*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14,536,779,925 dan Rp2,626,956,394.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

*Ekuitas Akhir
Rp28,473,505,899*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp28,473,505,899 dan Rp21,304,687,972.

F. PENGUNGKAPAN - PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Balai KIPM Medan I sebagai entitas dari BKIPM lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan menyikapi hal tersebut secara positif menyongsong perubahan organisasi dalam waktu yang dekat ini baik secara tuisi serta administrasi pelaporannya.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Selama periode berjalan, *Balai KIPM Medan I* telah melakukan lima kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal TA 2025. Hal ini disebabkan oleh perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

F.2.1 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Pelaksanaannya diantaranya Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan 11 kegiatan prioritas yang tersebar di satuan kerja Balai KIPM Medan I,

F.2.2 PENGUNGKAPAN TEMATIK APBN

Tematik APBN yang dilaksanakan pada Balai KIPM Medan I berupa Adaptasi Perubahan Iklim, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Satker	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Satuan	Target	Capaian	%	Keterkaitan dengan PN
Balai KIPM Medan I	Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	80,000,000	79,983,073	99.98	Rekomendasi Kebijakan	6	6	100	Mitigasi atas perubahan iklim sehingga mempengaruhi
Balai KIPM Medan I	Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang, Bersifat Invasif	24,700,000	24,204,000	97.99	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100	jumlah produksi dan lalu lintas perikanan serta ketahanan ekonomi nasional
JUMLAH		104,700,000	104,187,073	99.51%					

F.2.3 PENGUNGKAPAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

Dalam periode T.A 2025, output strategis yang sudah dicapai oleh Balai KIPM Medan I adalah sebagai berikut :

Nama Satker	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Satuan	Target	Capaian	%
Balai KIPM Medan I	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	110,000,000	109,976,270	99.98	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
Balai KIPM Medan I	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	25,000,000	23,989,738	95.96	Produk	80	80	100
Balai KIPM Medan I	Rekomendasi Kebijakan mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan	17,000,000	16,999,810	100	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
Balai KIPM Medan I	Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	25,000,000	25,000,000	100	Lembaga	1	1	100
Balai KIPM Medan I	Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan	50,000,000	49,750,000	99.5	Lembaga	5	5	100
JUMLAH		227,000,000	225,715,818	99.43%				

LAMPIRAN